

---

## STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN LITERASI MASYARAKAT KOTA BOGOR MELALUI LITERASI SQUAD

Oleh

Catrina Ratu Tunggal Agung

Dinas Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Kota Bogor

Email: [catrina.ratuta@gmail.com](mailto:catrina.ratuta@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 02-02-2025

Revised: 08-02-2025

Accepted: 05-03-2025

### **Keywords:**

IPLM, Literasi Squad, Literasi

**Abstract:** Tingkat minat baca masyarakat, menurut berbagai survei, masih rendah. Hal ini sangat bertentangan dengan tren meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Mengingat situasi ini, pemerintah Kota Bogor mengambil langkah untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan, bertujuan untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di daerah tersebut. Nilai IPLM Kota Bogor pada tahun 2023 tercatat 52, yang tergolong sedang, dan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 95,34 (sangat tinggi). Isu utama yang muncul adalah menurunnya tingkat literasi masyarakat di Kota Bogor dikarenakan kurangnya ketercukupan koleksi perpustakaan, kurangnya tingkat kunjungan masyarakat, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan. Dalam upaya melakukan penilaian untuk menganalisis prioritas alternatif kebijakan, maka diterapkan metode penilaian skoring 1-5, yang dilakukan oleh para ahli di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, termasuk pejabat Eselon II dan Eselon III. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas berdasarkan kriteria USG (Urgency, Seriousness, Growth). Berdasarkan hasil analisis skoring pada tabel diatas. Skor tertinggi dari kriteria analisis kebijakan adalah Program literasi Squad. Fokusnya adalah mencapai target capaian yang telah ditetapkan, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Penulisan ini mengusulkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, memanfaatkan inventarisasi data dan bahan rujukan yang bertujuan untuk meningkatkan IPLM, mendorong pembelajaran dan literasi berkelanjutan di Masyarakat.

---

## PENDAHULUAN

Rendahnya tingkat literasi di Indonesia menjadi masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berbagai program literasi telah diluncurkan untuk meningkatkan minat baca di tengah masyarakat, seperti Gerakan Indonesia Membaca (GIM), Gerakan Literasi Bangsa (GLB), dan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Meski upaya tersebut telah dilaksanakan, kenyataan di lapangan masih menunjukkan budaya literasi di masyarakat terbelah rendah. Beberapa survei mengindikasikan bahwa minat baca masyarakat juga memprihatinkan. Ini menjadi suatu

ironi, terutama bila dibandingkan dengan tren penggunaan internet dan media sosial yang terus mengalami peningkatan.

Perpustakaan merupakan sarana penting dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Sebagai unit kerja dari sebuah lembaga, perpustakaan berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka yang mendukung proses pendidikan, diatur secara sistematis untuk memudahkan akses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2016b), perpustakaan adalah lokasi atau gedung yang disediakan untuk memelihara dan memanfaatkan koleksi buku serta bahan pustaka lainnya, yang dapat dibaca, dipelajari, dan didiskusikan. (Zuliarso dan Februariyanti: 2013) berpendapat bahwa keberadaan perpustakaan sangat penting, sebab memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk belajar, tanpa memandang umur atau status sosial.

Peningkatan literasi di Kota Bogor menjadi fokus utama Pemerintah Kota Bogor. Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor mencakup berbagai isu strategis yang diidentifikasi, serta langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai strategi tersebut. Setiap langkah tersebut terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki 3 sasaran IKU yaitu Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan ber standar Nasional Perpustakaan (SNP), Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik di lingkup perangkat daerah.

Adapun Tujuan pada rencana strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2019-2024 adalah Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat dan Terwujudnya pengelolaan arsip yang berkualitas.

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator tujuan, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Bogor, perlu didukung oleh pencapaian indikator sasaran, yakni Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di wilayah tersebut. Pada tahun 2023, nilai IPLM Kota Bogor tercatat sebesar 52, yang tergolong sedang, dan sangat menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 95,34 atau sangat tinggi. Fenomena yang muncul adalah penurunan tingkat literasi masyarakat di Kota Bogor. Masalah yang dihadapi meliputi penurunan pada tiga unsur dari tujuh indikator penilaian IPLM, yaitu ketercukupan koleksi perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan kembali indeks literasi masyarakat di Kota Bogor.

Penurunan tingkat literasi di Kota Bogor pada tahun 2023 menjadi sebuah fenomena yang perlu diperhatikan. Meskipun telah banyak studi kasus yang membahas rendahnya kemampuan membaca dan menulis di kalangan mahasiswa Indonesia, hingga saat ini belum ada pendekatan atau teori baru yang efektif untuk memotivasi masyarakat dalam kegiatan literasi tersebut.

Harapannya dengan penerapan sistem pendekatan terkini, masyarakat dapat menyadari pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan aktif terlibat dalam kegiatan membaca dan menulis. Namun, upaya ini menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya yang bersifat teknis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang mampu meningkatkan literasi masyarakat Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif sebagai dukungan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi

Masyarakat (IPLM) Kota Bogor. Rekomendasi ini diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai IPLM di Kota Bogor.

## LANDASAN TEORI

Memajukan budaya literasi di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun berbagai gerakan literasi telah dilakukan secara nasional, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga, sayangnya gerakan ini belum berjalan secara terpadu dan sinergis. Akibatnya, upaya tersebut belum memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan budaya literasi di tingkat nasional. Untuk mengatasi hal ini, peta jalan peningkatan budaya literasi tengah disusun dan akan didukung dengan peraturan presiden.

Indeks budaya literasi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci, baik dalam format cetak maupun elektronik; persentase yang mengakses internet; serta persentase yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat. Dari ketiga indikator tersebut, yang mengalami angka terendah adalah kunjungan ke perpustakaan, yang pada tahun 2018 hanya mencapai 12,16 persen. Menurut target, pada tahun 2024, diharapkan peningkatan indeks budaya literasi dapat mencapai 71,04 persen. Namun, realitanya, antara tahun 2018 hingga 2019, peningkatan yang dicapai hanya sebesar 4,08 poin.

Berbagai intervensi dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi, termasuk peningkatan akses dan kualitas layanan di berbagai jenis perpustakaan, seperti perpustakaan umum provinsi, kabupaten, kota, perpustakaan sekolah, madrasah, perpustakaan desa, serta taman bacaan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan ketersediaan konten literasi yang berkualitas dalam berbagai format, seperti e-book, buku, dan video. Tak kalah penting, kita perlu mendorong budaya gemar membaca di kalangan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung transformasi digital.

1. Salah satu sarana penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat adalah perpustakaan. Perpustakaan berfungsi sebagai unit kerja suatu lembaga yang menyimpan koleksi bahan pustaka yang terorganisir dan mendukung proses pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016b), perpustakaan diartikan sebagai tempat atau gedung yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku serta bahan pustaka lainnya, yang dapat dibaca, dipelajari, dan didiskusikan.
2. Zuliarso dan Februariyanti (2013) menekankan bahwa perpustakaan seharusnya menjadi pusat aktivitas dalam pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca di masyarakat. Tanggung jawab perpustakaan sangat besar dalam meningkatkan dan mengembangkan minat serta kecintaan masyarakat terhadap membaca. Namun, Nurbatra dkk. (2017) menunjukkan bahwa keberadaan perpustakaan di Indonesia masih belum tersebar merata, khususnya di tingkat masyarakat yang lebih kecil. Selain itu, penggunaan perpustakaan di tingkat kabupaten atau kota juga belum optimal, mengingat tingkat minat baca masyarakat yang masih rendah.
3. Gerakan Literasi Nasional (GLN) adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan literasi di kalangan masyarakat. Program ini melibatkan berbagai elemen,

termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga. Salah satu dasar hukum yang mendukung peningkatan literasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Jokowi pada 29 Mei 2019, dan PP Nomor 75 Tahun 2019 dikeluarkan untuk memastikan implementasi yang tepat dari ketentuan yang ada.

4. Literasi sendiri dipahami sebagai kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi secara kritis, sehingga individu dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih baik. Selain itu, literasi juga mencakup keterampilan dalam menggunakan berbagai metode untuk menyampaikan dan memahami ide serta informasi.
5. Peraturan lain yang mendukung pengembangan literasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015, yang mengatur tentang Penumbuhan Budi Pekerti melalui kebiasaan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tujuan dari peraturan ini adalah menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan inspiratif bagi siswa, guru, serta tenaga kependidikan, serta menjadikan pembiasaan sikap dan perilaku positif sebagai bagian dari proses belajar dan budaya di sekolah. Gerakan pendidikan karakter ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua, untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mempunyai budi pekerti yang baik.
6. Kebudayaan dan pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena segala hal yang ada dalam kebudayaan diperoleh melalui proses belajar. Kebiasaan membaca dan menulis adalah keterampilan yang bisa dikembangkan menjadi sebuah budaya. Melalui membaca, seseorang dapat mengakses informasi, meningkatkan pengetahuan, dan memperkaya intelektual. Literasi, yang lebih dikenal sebagai keberaksaraan, sering kali dianggap sebagai kunci yang membuka pintu menuju modernisasi, partisipasi, empati, demokratisasi, desentralisasi ilmu pengetahuan, serta perbaikan taraf hidup, terutama di bidang ekonomi, yang pada gilirannya mendorong kemajuan bangsa.
7. Laporan UNESCO tahun 2005 berjudul "Literacy for Life" mencatat adanya hubungan yang kuat antara ketidakberaksaraan dan kemiskinan. Di banyak negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, seperti Bangladesh, Ethiopia, Ghana, India, Nepal, dan Mozambique, tingkat ketidakberaksaraan juga cenderung tinggi.
8. Mereka yang memiliki kemampuan literasi (melek huruf secara fungsional) memiliki peluang untuk mencari dan memperoleh informasi yang bermanfaat. Dengan informasi tersebut, mereka dapat meningkatkan pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup. Untuk memahami manfaat literasi, kita perlu mengetahui apakah membaca hanya sekadar aktivitas untuk mengisi waktu luang atau lebih dari itu. Penting juga untuk mengenali jenis bacaan yang diakses, serta melakukan evaluasi terhadap bahan bacaan tersebut (Ridwan, 2004).

Ahmad Bukhori, seorang dosen di Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa dalam konteks masa kini, literasi memiliki makna yang sangat luas. Literasi mencakup kemampuan untuk melek teknologi, memahami politik, berpikir kritis, serta peka terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, Kirsch dan Jungeblut (2005) dalam karya mereka yang berjudul *\*Literacy: Profiles of America's Young Adults\** mendefinisikan literasi kontemporer sebagai kemampuan individu untuk memanfaatkan informasi tertulis atau cetak guna

mengembangkan pengetahuan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Ridwan (2004) menjelaskan bahwa minat membaca adalah suatu dorongan atau kecenderungan yang kuat untuk menikmati aktivitas membaca. Dukungan melalui sarana dan prasarana membaca dapat menumbuhkan kebiasaan membaca, yang kemudian akan berkembang menjadi budaya baca di dalam masyarakat. Minat baca dapat dipupuk, dibina, dan dikembangkan karena ia bukanlah keterampilan bawaan, melainkan keterampilan yang diperoleh setelah seseorang lahir.

Edward Burnett Tylor (1832-1917), dalam perspektif antropologinya, mendefinisikan kebiasaan—atau yang sering disebut sebagai folkways—sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang dan dalam cara yang sama. Kebiasaan ini memiliki dampak yang lebih mendalam dibandingkan dengan sekadar diskusi mengenai hubungan antarindividu di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kebiasaan yang didefinisikan sebagai tindakan repetitif mencerminkan aktivitas yang disukai oleh banyak orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Depdikbud (1995: 129), kebiasaan dijelaskan sebagai perilaku yang sering dilakukan, merujuk kepada pola respons yang dipelajari individu terhadap situasi tertentu, dan diulang untuk hal yang sama.

Terlepas dari itu, terdapat berbagai kebijakan yang diambil untuk meningkatkan literasi masyarakat dari pemerintah pusat, salah satunya ialah Peraturan Perpustakaan Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan merubah paradigma fungsi perpustakaan melalui transformasi yang berfokus pada inklusi sosial.

Adapun tujuan dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini meliputi:

- Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat
- Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensi mereka
- Meningkatkan literasi informasi masyarakat
- Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kreativitas
- Memperluas jejaring sosial masyarakat
- Membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan serta kepercayaan diri mereka.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan perpustakaan di wilayah Kota Bogor. Penyelenggaraan perpustakaan mencakup serangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pemanfaatan, hingga pengawasan perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan berfungsi sebagai lembaga yang mengelola berbagai koleksi karya tulis, baik yang tercetak maupun yang direkam, serta memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi masyarakat.

Tujuan dari penyelenggaraan perpustakaan ini antara lain adalah untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan minat baca, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, perpustakaan sekolah diharuskan untuk menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional.

Standar tersebut mencakup berbagai aspek, seperti koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga pengelola, penyelenggaraan, serta manajemen.

Dalam pengelolaan perpustakaan, pustakawan memiliki peran yang sangat penting. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada pelayanan administrasi dan pendaftaran anggota perpustakaan, tetapi juga mencakup pengelolaan struktur organisasi, penyusunan peraturan tata tertib penyelenggaraan perpustakaan, serta pengelolaan agenda surat menyurat. Dengan demikian, pustakawan menjadi kunci dalam memastikan fungsi perpustakaan berjalan dengan baik dan efektif.

Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 120 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewajiban dan Kewenangan, serta proses Pembentukan dan Pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca. Selain itu, juga ditetapkan ketentuan mengenai Pemberian Penghargaan, Pembiayaan dan Bantuan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, serta Ketentuan Peralihan dan Penutup.

## METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam Penelitian ini mencakup dua langkah utama, yaitu inventarisasi data yang diperlukan dan pengumpulan bahan referensi yang relevan. Bahan referensi tersebut meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), peraturan Presiden (Perpres), serta peraturan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia dan instansi kementerian atau lembaga terkait lainnya.

Langkah awal ini juga mencakup perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar bagi analisis yang lebih mendalam. Proses pengolahan data dimulai dengan mentabulasi dan memadukan data yang telah dikumpulkan, serta memastikan bahwa data tersebut lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai dengan kebutuhan analisis.

Selanjutnya, akan dilakukan perumusan alternatif kebijakan dengan menggunakan pendekatan teoritis, diikuti dengan evaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pemilihan prioritas dari masing-masing alternatif kebijakan akan dilakukan melalui penilaian skoring oleh individu kunci, dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang dari setiap alternatif tersebut.

Akhirnya, pendekatan logic model akan diterapkan untuk mengevaluasi program dan sasaran kegiatan yang mendukung kebijakan yang lebih luas, sehingga dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara keseluruhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, pemerintah daerah Kota Bogor berupaya untuk menerapkan beberapa alternatif kebijakan berdasarkan pedoman tersebut. Oleh karena itu, dilakukan perumusan alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan pendekatan deskriptif dan normatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh (William N. Dunn pada tahun 2018).

Alternatif pertama adalah kebijakan biaya masuk ke perpustakaan dan menjadi anggota perpustakaan Gratis. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat memicu masyarakat Kota Bogor

dan sekitarnya untuk berkunjung ke perpustakaan. Tantangan terhadap kebijakan tersebut adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perawatan koleksi buku dan fasilitas perpustakaan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bogor yang harus dianggarkan dari APBD Kota Bogor.

Alternatif kedua yaitu, menerapkan Kebijakan dalam program Literasi Squad. Program ini dilaksanakan dengan menggandeng dua komunitas besar yaitu komunitas Duta Baca dan Komunitas generasi berencana (GENRE). Sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan. Program ini dilaksanakan Non APBD, Dalam hal ini Dinas Arsip dan Perpustakaan kota Bogor menggandeng dua komunitas besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan. Komunitas Duta Baca dan Komunitas Generasi Berencana (Genre) sebanyak 30 orang bergabung menjadi relawan sebagai petugas perpustakaan. Tantangan dari kebijakan ini adalah tidak adanya jenjang karier bagi para relawan sebagai petugas perpustakaan dan keterbatasan kontrak dan bantuan dari stakeholder dalam memberikan subsidi bantuan pembiayaan tenaga relawan.

Alternatif ketiga yaitu, menambah jam kunjungan Perpustakaan, layanan hari sabtu, minggu, sehingga tidak hanya di hari kerja, tetapi juga di hari libur, masyarakat dapat berkunjung ke perpustakaan. Tantangan dari kebijakan ini adalah meningkatnya cost atau biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas perpustakaan. Alternatif Keempat adalah menambah jumlah koleksi perpustakaan ter up-date. Koleksi buku yang terbaru merupakan daya tarik bagi pengunjung untuk datang ke perpustakaan. Tantangan dari kebijakan tersebut adalah keterbatasan anggaran, kurangnya personel sebagai pengumpul yang terampil, kurangnya tenaga profesional yang memiliki kecakapan di bidang perpustakaan, kendala aksesibilitas yaitu kesenjangan digital (digital divide) antara berbagai kelompok masyarakat. Beberapa pengguna mungkin tidak memiliki akses ke perangkat digital atau internet yang memadai. Alternatif kelima yaitu meningkatkan fasilitas perpustakaan, mempromosikan buku dan mengadakan program literasi. Tantangan terhadap kebijakan ini sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan promosi buku dan program literasi.

#### **Pilihan/ Alternatif Kebijakan**

Dalam rangka menganalisis prioritas alternatif kebijakan, penilaian dilakukan menggunakan metode skoring 1-5 oleh para pemangku kepentingan/ Key Person di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, yakni pejabat Eselon II dan Eselon III. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan urutan prioritas berdasarkan kriteria USG (Urgensi, Keseriusan, Pertumbuhan) sebagai berikut:

Tabel 1. Skoring Alternatif Kebijakan

<b>Kriteria Alternatif Kebijakan</b>	<b>Urgency (Mendesak)</b>	<b>Seriousness (Kegawatan)</b>	<b>Growth (Pertumbuhan)</b>	<b>Total</b>	<b>Rangking</b>
Biaya masuk ke perpustakaan dan menjadi anggota perpustakaan Gratis	4	4	5	13	2
Program Literasi Squad	5	5	4	14	1

menambah jam kunjungan Perpustakaan, layanan hari sabtu, minggu	4	4	4	12	3
Menambah jumlah koleksi perpustakaan ter up-date	3	4	4	10	5
meningkatkan fasilitas perpustakaan, mempromosikan buku dan mengadakan program literasi	4	4	3	11	4

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan dalam tabel di atas, program Literasi Squad memperoleh skor tertinggi di antara kriteria analisis kebijakan. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan melibatkan relawan sebagai petugas perpustakaan, mulai dari front office hingga penjaga ruang baca. Dalam pelaksanaannya, program ini diawasi oleh dua orang ASN dan Non-ASN dari Dinas Arsip dan Perpustakaan yang bertugas secara shifting setiap akhir pekan, yakni pada hari Sabtu dan Minggu.

Keberadaan Literasi Squad telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan pada hari-hari tersebut, yang menjadi indikator penting dalam meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, khususnya dalam hal Persentase Perpustakaan Berstandar Nasional (SNP). Selain itu, program Literasi Squad juga berkontribusi dalam mencapai nilai indeks reformasi birokrasi, yang merupakan salah satu sasaran IKU Kepala Daerah.

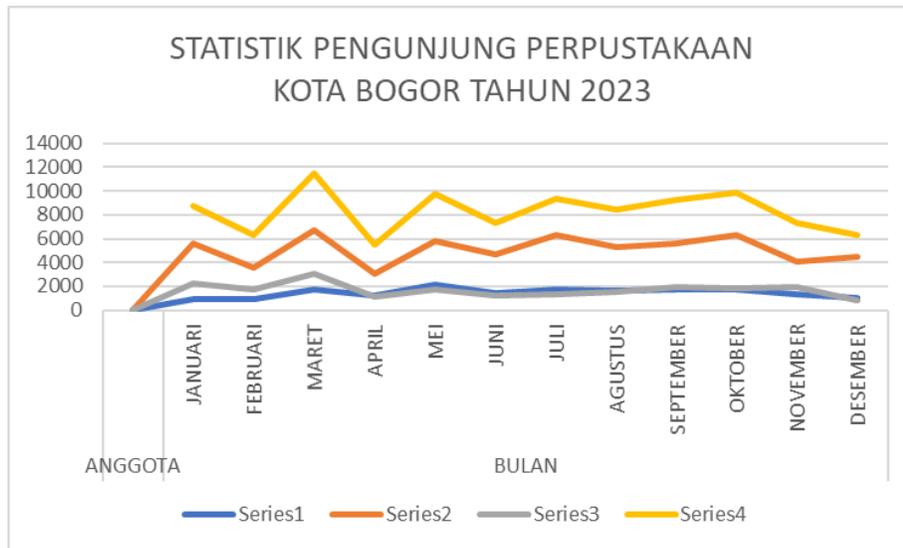
Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan Tahun 2023 adalah sebanyak 99.615 pengunjung pertahun atau sekitar 300 orang perhari. Meningkat tajam dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebanyak 5.249 pengunjung per tahun Atau sekitar 15 orang perhari. Jumlah pengunjung pertahun perpustakaan Kota Bogor dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.1 Jumlah Pengunjung Pertahun

Aspek/fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Realisasi (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perpustakaan					
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	28.530	1084	5249	99.615	105.234

Berdasarkan data pengunjung perpustakaan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tren kenaikan jumlah pengunjung mulai meningkat drastis di tahun 2023, sejak

dibentuknya Literasi Squad di Perpustakaan Kota Bogor. Statistik pengunjung per bulan di tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1 Statistik Pengunjung

Pada tahap jangka pendek, Literasi Squad melaksanakan berbagai kegiatan literasi untuk meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Kota Bogor. Kegiatan tersebut meliputi pemilihan Duta Baca Kota Bogor, lomba bertutur, perpustakaan keliling, storytelling, bedah buku, program bunda literasi, pelatihan mendongeng, dan berbagai program literasi lainnya.

Selanjutnya, pada tahap jangka menengah, fokus akan dialihkan ke pembangunan Literasi Squad Digital. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menciptakan aplikasi layanan perpustakaan digital yang terintegrasi, yang mencakup sistem informasi pendaftaran anggota perpustakaan, aplikasi peminjaman buku online, aplikasi pengaduan masyarakat, aplikasi booking online, dan aplikasi-aplikasi lain yang saling terhubung.

Akhirnya, pada tahap jangka panjang, diharapkan Literasi Squad dapat diperluas hingga mencakup 154 perpustakaan yang berada di sekolah-sekolah di seluruh Kota Bogor. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan capaian sasaran indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, khususnya dalam mewujudkan perpustakaan ber-SNP di seluruh kawasan Kota Bogor.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, peningkatan literasi masyarakat di Kota Bogor melalui program Literasi Squad yang dikelola oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Kota Bogor, akan terus dikembangkan dan disempurnakan. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada target capaian yang telah ditetapkan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Berdasarkan berbagai alternatif kebijakan yang ada, program prioritas yang ditetapkan adalah Literasi Squad. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, diperlukan sebuah kerangka kebijakan yang mengatur tugas, wewenang, dan pelaksanaan

kegiatan. Kerangka ini akan menjadi pedoman dalam meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Bogor.

Rekomendasi kebijakan ini akan dituangkan dalam Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Literasi, yang bertujuan untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat. Melalui peraturan ini, diharapkan mekanisme dan prosedur kegiatan literasi dapat diatur dengan baik, sehingga program-program dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran. Di samping itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai pedoman koordinasi antara tingkat pusat dan daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara program pusat dan daerah yang berdampak signifikan dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia, terutama di Kota Bogor.

Selanjutnya, peraturan ini akan diteruskan menjadi peraturan Gubernur Jawa Barat, yang akan secara komprehensif mengatur berbagai kegiatan literasi untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian indikator indeks pembangunan literasi masyarakat. Mengacu pada peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah Kota Bogor nantinya dapat merumuskan Peraturan Walikota Bogor yang bertujuan untuk menyusun pedoman, mekanisme, dan prosedur kegiatan literasi di Kota Bogor dengan lebih detail, sesuai dengan kondisi dan situasi pengunjung perpustakaan yang ada. Konten dalam peraturan ini juga akan mencakup pengaturan standar operasional Literasi Squad, standar penghasilan relawan, standar layanan perpustakaan, standar fasilitas perpustakaan, standar penyampaian informasi, standar layanan pengaduan, serta pengelolaan sumber daya manusia di perpustakaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bukhori Muslim, Ahmad. "Educational Standardization in Indonesia: A Case for Teacher Education and Student Assessment."
- [2] Tylor, Edward Burnett. 1871. *Primitive Culture*. London: Cambridge University Press.
- [3] Setiadi, Elly M. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*.
- [4] Nurahmad, Hadi. "Tentang Literasi."
- [5] Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). 2023. "Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)."
- [6] KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- [7] KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud. 1995: 129.
- [8] Kirsch, Irwin S. & Jungeblut, Annie. 1993. "Literacy: Profile of America's Young Adults."
- [9] Nurbrata, L., Hartono, H., Wardhani, A., & Masyhud, M. 2017. "Peningkatan Literasi Masyarakat melalui Pengadaan & Pengelolaan Majalah Dinding di Taman Bacaan Masyarakat Wacan." *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)* 1 (1): 175-184.
- [10] Siregar, A. Ridwan. 2004. "Pengembangan Diri." *Literasi: Jurnal Kajian...*
- [11] Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2. 2024. "Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum."
- [12] Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor. 2019-2024.
- [13] Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2020-2024.
- [14] Ridwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [15] Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*.
- [16] UNESCO. 2005. *Literacy for Life*. Paris: United Nations Educational, Scientific, and

- Cultural Organization.
- [17] Zuliarso, E. & Februariyanti, H. 2013. *Sistem Informasi Perpustakaan Buku*.
- [18] Wantini, Nonik Ayu. "Efek Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Kanker Payudara Pada Wanita Di Dusun Terongan, Desa Kebonrejo, Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur." *Jurnal Medika Respati* 13 (2018): 8.
- [19] Yunitasari, Esti, Retnayu Pradanie, and Ayu Susilawati. "Pernikahan Dini Berbasis Transtuktural Nursing Di Desa Kara Kecamatan Torjun Sampang Madura." *Jurnal Ners* 11, no. 2 (2016): 6.
- [20] 1,2 contoh

---

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN